

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi memiliki berbagai infrastruktur maupun suprastruktur politik yang menunjang berjalannya proses demokrasi. Suprastruktur politik terdiri dari lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dan infrastruktur politik terdiri dari partai politik, *interest group*, *pressure group*, media komunikasi politik, *journalism group*, *student group*, *political figure*. Agar tercapainya proses demokrasi yang mapan, kesemua elemen tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses bernegara. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan menimbulkan iklim demokrasi yang partisipatif, maka dari itu pendidikan politik merupakan suatu entitas penting yang harus terjadi dalam dialektika masyarakat demokrasi.

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Sedangkan

indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin (Surbakti, 2010:150).

Negara yang berasas demokrasi melaksanakan pendidikan politik bukan indoktrinasi, karena indoktrinasi politik bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri. Secara substansial pendidikan politik dilakukan secara terencana dan secara sadar oleh aktor aktor politik. Pendidikan politik dilaksanakan oleh lembaga lembaga formal, informal secara langsung antara penerima dan pemberi informasi sehingga komunikasi yang terbentuk adalah komunikasi yang dialogis dan dialektis, yang nantinya dari komunikasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi aktif individu masyarakat. Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan tujuan politik (Kartono, 2011:65).

Sebagai salah satu infrastruktur politik organisasi masyarakat memiliki peranan dan juga tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, ormas bertujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, dan ormas berfungsi salah satunya adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Sehingga secara eksplisit ormas memiliki tanggung jawab akan penyelenggaraan pendidikan politik agar terciptanya masyarakat yang partisipatif dan *well educated*.

Salah satu ormas yang secara langsung berhadap-hadapan dengan wilayah perpolitikan adalah Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), dikarenakan GPK merupakan salah satu underbow Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan ini membuat GPK mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan politik dibandingkan ormas ormas lain yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan GPK sendiri tidak hanya untuk mengisi struktur keorganisasian tapi juga untuk pemenangan kontestasi politik PPP.

Gerakan Pemuda Ka'bah yang memiliki dinamika paling pesat dan masif adalah GPK Kota Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan jumlah anggota GPK kota Yogyakarta mencapai 5000-an dan menjadi milisi sipil dengan anggota terbanyak di Yogyakarta.

Konsekuensi logis yang hadir dari era globalisasi saat ini yang terkenal dengan gaya hidup serba praktis dan individualistik adalah kaum muda yang asosial dan apolitis. Hal ini menjadi tidak aneh karena banyaknya entitas entitas yang membuat kaum muda teralienasi dari kenyataan dan pentingnya kesadaran politik, misalnya saja media sosial. Disini GPK secara langsung hadir sebagai jawaban dari kurangnya minat anak muda untuk berpartisipasi dalam dinamika perpolitikan, hal ini dibuktikan dengan mayoritas kader GPK Kota Yogyakarta yang merupakan kaum muda. Bahkan anggota-anggota GPK dikenal ideologis dan militan hal ini bisa dilihat dari sepak terjang mereka yang berani bertarung fisik dalam beberapa peristiwa.

Konvoi motor, *sweeping*, dan bentrok fisik dengan ormas dan kelaskaran lain yang melibatkan massa merupakan aksi yang identik dengan mereka (Saputro, 2016:3).

Kecamatan Gondomanan memiliki jumlah penduduk usia muda yang tidak sedikit dan merupakan salah satu wilayah dengan massa GPK paling banyak, wilayah ini juga disebut sebagai zona merah karena seringnya terjadi gesekan antara simpatisan PDIP dan PPP seperti yang terjadi pada pemilu 2014. Kecamatan Gondomanan juga menjadi salah satu pusat komando bagi GPK karena letaknya yang berada di tengah kota Yogyakarta. Selain itu sumber pendapatan yang dikelola oleh GPK juga berada di Kecamatan Gondomanan, contohnya adalah lahan parkir Ngabean dan juga pengelolaan PKL di alun alun utara.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Usia Rentang Pemuda adalah 16-30 tahun, berikut tabel jumlah pemuda di Kecamatan Gondomanan:

Tabel 1.1
Pemuda Kecamatan Gondomanan Tahun 2017

No	Usia	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	16-18 Tahun	386	399	785
2	19-35 Tahun	2216	2177	4394
Jumlah		2603	2576	5179

Sumber: <http://www.kependudukan.jogjaprovo.go.id>

Pada saat ini tingkat partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil pilkada Kota Yogyakarta

Tahun 2017 dimana tingkat golput masih tinggi di kisaran 25-30 persen, dimana 17 persennya adalah kaum muda. Kaum muda banyak yang tidak ikut serta dalam melakukan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU setempat. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak kaum muda yang belum memiliki kesadaran politik terutama dalam menggunakan hak suaranya.

Mayoritas anggota GPK yang merupakan kaum muda dan memiliki tingkat militansi tinggi di tengah-tengah tantangan era globalisasi ini membuat penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam peran Gerakan Pemuda Ka'bah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda dalam penelitian dengan judul "Peran Gerakan Pemuda Ka'bah dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yaitu:

1. Bagaimana peranan Gerakan pemuda Ka'bah dalam pendidikan politik di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk pendidikan politik Gerakan Pemuda Ka'bah Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana partisipasi kaum muda di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk Mengetahui peranan Gerakan Pemuda Ka'bah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan Gerakan Pemuda Ka'bah untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui partisipasi kaum muda Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan kajian tentang ilmu politik dan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh Gerakan Pemuda Ka'bah di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Organisasi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan Organisasi Masyarakat melakukan pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum.

b. Bagi Masyarakat

Menambah khasanah ilmu pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik yang ada dalam praktek pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pembandingan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Peran Organisasi Masyarakat

Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. (Salim, 2011:132) peran erat kaitannya dengan status dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2012:33).

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki kesamaan yang saling berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung (Linton, 2014:268).

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Suhardono menyatakan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan. Jadi berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan peran adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam menduduki suatu jabatan atau status di dalam suatu masyarakat. Menurut teori ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam organisasi atau pergaulannya. Sebagaimana diungkapkan dalam pengertian peran diatas maka Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) disini yaitu sebagai:

1. Peran Ormas sebagai Motivator

2. Peran Ormas sebagai Fasilitator
3. Peran Ormas sebagai Pembina dan Pelatihan
4. Peran Ormas sebagai Mobilisator (Yusuf, 2016 : 430).

Alasan pertama kali Gerakan Pemuda Ka'bah dibentuk adalah untuk kepentingan partai PPP untuk memenangkan kandidat politik di setiap wilayah. GPK dibentuk untuk alasan amar ma'ruf nahi munkar. (Syamsudin,1991)

2. Partisipasi Aktif

a. Pengertian Partisipasi Aktif

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” (Prasetyo, 2008:11).

Hal senada diungkapkan oleh Sastropeotro, bahwa: Partisipasi adalah keterlibatan mental atau fikiran dan perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Sastropeotro, 2008:13).

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi bukan hanya keterlibatan yang sifatnya lahiriah saja, akan tetapi keterlibatan ini menyangkut pikiran dan perasaan. Turindra menyatakan bahwa, “partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat”. Turindra mengemukakan bahwa “dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu (Turindra, 2009:60).

Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan”. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Dari berbagai pengertian tersebut, pada dasarnya:

- a. Adanya keterlibatan secara utuh dari pribadi-pribadi.
- b. Adanya kesediaan memberikan sumbangan dalam bentuk apapun sehingga tanggungjawab ini melahirkan tindakan atau partisipasi yang tidak dipaksa atau dipaksakan.

Dari uraian-uraian mengenai partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa peranan partisipasi sangatlah vital, karena dengan

partisipasi semua inisiasi dan kreasi lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

Sastropetro mengemukakan tentang unsur-unsur penting yang turut menentukan partisipasi, yaitu:

- a. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif/berhasil.
- b. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
- c. Kesadaran yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan.
- d. Enthoiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain
- e. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama(Sastropetro, 2012:41).

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari sebuah program bersama, dengan kata lain partisipasi masyarakat merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat terhadap suatu program. Partisipasi masyarakat menurut Turindra adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Turindra menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat

mempunyai sifat sangat penting, yaitu: Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyekproyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-cetered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia(Turindra, 2009:60).

b. Sifat-Sifat Dan Ciri-Ciri Partisipasi

Sastropeotro menjelaskan bahwa sifat dan ciri-ciri dari partisipasi antara lain(Sastropoetro, 2012:23):

- a. Partisipasi haruslah bersifat sukarela
- b. Sebagai issue atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif.

- c. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Dari pernyataan diatas jelas tergambar bahwa yang paling menonjol dalam partisipasi adalah adanya rasa tanggung jawab dan sukarela untuk memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan kegiatan bersama. Turindra membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut (Turindra, 2009:60):

- a. Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsic berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.
- b. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh

masyarakat setempat. Jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.

- d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

c. Bentuk Partisipasi

Menurut Samuel P. Huntington dan Joam M. Nelson dalam buku yg berjudul Teori dan Praktik Politik di Indonesia(Qodir, 2016:73),partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Electoral activity

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Termaksud dalam kegiatan ini antara lain yakni memberikan sumbangan untuk sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung atau memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengawasi

pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan visi dan misi yang disampaikan.

b. *Lobbying*

Tindakan seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk memengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut masalah-masalah tertentu yang memengaruhi kehidupan mereka.

c. *Organizational activity*

Keterlibatan warga negara ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik sebagai pemimpin, pengurus, atau anggota biasa. Organisasi ini mempunyai fungsi memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya organisasi yang spesifik menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau keagamaan.

d. *Contacting*

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi lewat telepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik dilakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.

e. *Violence*

Partisipasi politik yang berupa tindakan dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah

3. Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik adalah gabungan dari dua kata, yakni pendidikan dan politik. Menurut Susanto bahwa: “inti kegiatan pendidikan sebenarnya, selain menyangkut proses belajar, juga menyangkut *conditioning* dan *reinforcement* terhadap masyarakat”. Sehingga dengan demikian pendidikan ialah merupakan proses belajar seseorang tentang sesuatu serta mempersiapkan kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menghasilkan rangsangan yang akan menghasilkan reaksi atau respon tertentu. Apabila dihadapkan pada konsep pendidikan politik, maka belajar tentang sesuatu diartikan belajar tentang politik (Susanto, 2007:19).

Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian yang mengatakan bahwa: "pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun" (Alfian,2011:235).

Dari definisi yang tertera di atas, dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Menurut Supriadi, karena kata pendidikan politik dan dan kata sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama maka dapat digunakan secara bergantian (Supriadi, 2012:70). Alfian juga menganggap bahwa adanya keeratan hubungan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik sehingga ia mengatakan bahwa: “Adapun sosialisasi politik ini dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar”(Alfian,2011:235).

Mengenai pengertian dari pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) Alfian mengatakan: “dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk megubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak di bangun” (Alfian,2011:235).

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kartono bahwa: “pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuantujuan politik” (Kartono, 2916:64).

Dalam kaitan pendidikan politik ini, Djahiri menyatakan bahwa:

“Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.” (Djahiri, 2015:18)

Memahami dan memiliki rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada, ialah merupakan ciri sudah atau mulai tertanamnya kesadaran politik. Dengan demikian pendidikan politik berupaya merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik. Memiliki kesadaran politik berarti memiliki keterpaduan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari individu dalam berpolitik.

Sehingga dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda dijelaskan bahwa:

“Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien”.

Dihubungkan dengan tujuan pendidikan politik untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran politik sehingga

terjadi pembaharuan kehidupan politik dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang demokratis.

b. Fungsi Pendidikan Politik

Sesuai dengan pengertian pendidikan politik itu sendiri maka pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama yaitu pertama dalam merubah atau membentuk tata laku pribadi atau individu dan yang kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik. Menurut Kartono bahwa pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi:

- 1) Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya,
- 2) Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern (Kartono, 2916:64).

Fungsi pendidikan diatas lebih menekankan fungsinya dalam merubah tatanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya yang ditandai dengan adanya perubahan sikap dari individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang lebih mendukung proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan bagi individu sendiri, menurut Kartono ialah:

- 1) Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh-sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan,
- 2) Di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat (Kartono, 2916:59).

Fungsi pendidikan politik bagi individu diatas intinya ialah bahwa pendidikan politik berusaha merubah aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari individu. Kantaprawira memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya (Kantaprawira,2014:86).Dalam kaitan itu Affandi mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasinya dalam menyalurkan tuntutan dan dukungan.

c. Tujuan Pendidikan politik

Secara formal, maksud diadakannya pendidikan politik menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda ialah: memberikan pedoman kepada generasi muda indonesia guna

meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun tujuan dari pendidikan politik menurut Amril, yaitu:

- 1) Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga negara yang baik; khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik, seperti bisa mengembangkan sikap gotong royong/kooperatif, mau bermusyawarah dan kerja sama; bersikap toleran, solider, loyal terhadap bangsa dan Negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
- 2) Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk egoisme dan menjadi bintang politik).
- 3) Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada di tengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu bisa berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.

- 4) Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik politik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan; jadi terdapat partisipasi politik. Sebab, urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan politik yang menyangkut mati hidupnya diri sendiri dan keselamatan rakyat pada umumnya.
- 5) Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan prosesproses politik dari warga negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera (Sunny, 2014:104).

Menurut Alfian untuk menganalisis keberhasilan pendidikan politik dilihat dari dua dimensi, dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan, dimensi kedua ialah realitas atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik tadi (Alfian, 2010:236).

d. Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian, bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan suatu negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah negara.

Bentuk dan cara untuk mensosialisasikan pendidikan politik dilakukan dengan cara :

1. Pengajaran pendidikan politik yang benar

Pengajaran pendidikan politik yang benar dapat dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga akan memperoleh pengetahuan mengenai politik yang sesungguhnya dan akan terpengaruh untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu keadaan politik tertentu.

2. Diskusi

Diskusi dapat dijadikan media para anggota untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pendidikan politik ataupun situasi

politik terkini sehingga dapat mengevaluasi partai politiknya dan menentukan strategi untuk memenangkan dan merancang kemenangan partai politik.

3. Pelatihan kepemimpinan

Pelatihan kepada kaum muda untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu bertanggung jawab dan dapat berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah serta dapat mengeluarkan pendapat secara etis dan profesional dalam konflik politik yang terjadi.

4. Pendidikan politik melalui bidang keolahragaan

Olahraga merupakan salah satu cabang kegiatan yang paling disukai para kaum muda, karena dengan berolahraga seseorang akan bebas mengekspresikan dirinya melalui pertandingan-pertandingan yang diadakan.

5. Publikasi dan Komunikasi massa

Salah satu alternatif metode yang memungkinkan sikap dan garis partai dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga peristiwa, momentum dan informasi yang penting dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. (Dhakidae, 2004:106).

Sedangkan David Easton dan Jack Dennis (Muchtar, 2000:39) dalam bukunya *children in the political system* memberikan batasan

mengenai *political socialization* yaitu bahwa “*political socialization is development process which persons acquire orientation and patterns of behaviour*”. Sedangkan Fred I. Greenstein (Muchtar, 2000:39) dalam bukunya *political socialization* berpendapat bahwa :

Political socialization is all political learning formal and informal, deliberate and unplanned, at every stage of the life cycle including not only explicit political learning but also nominally nonpolitical learning of political ideas relevant social attitudes and the acquisition politically relevant personality characteristics.

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal.

Semua bentuk pendidikan politik sebenarnya tidak jadi persoalan, artinya semuanya baik asalkan mampu memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik tersebut dapat merubah individu yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya atau memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa negara.

Kantaprawira memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dalam hubungan itu, pola pendidikan politik rakyat yang akan kita selenggarakan di masa depan harus bisa mengantarkan kita untuk mewujudkan suatu masyarakat madani, yaitu masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal dan menyerap nilai-

nilai Demokrasi Indonesia secara konstruktif sehingga dari waktu ke waktu dapat memiliki suatu sistem yang makin demokratis. Bukan sebaliknya makin otoritarian, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Tujuan pendidikan politik sendiri ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

F. Definisi konseptual

Adapun definisi Konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah konsekuensi dari sebuah kedudukan. Dengan kata lain, aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang diakibatkan dari kedudukan itu, maka hal itu disebut sebagai peranan.

2. Partisipasi aktif

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

G. Definisi Operasional

Defenisi operasional dari penelitian ini untuk mengetahui peran gerakan pemuda ka'bah dalam pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum pemuda Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, antara lain:

1. Peran Organisasi Masyarakat (GPK)
 - a. Memotivasi kader maupun kaum muda utuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.
 - b. Menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan yang terstruktur bagi kader maupun kaum muda sesuai dengan cita cita bersama.
 - d. Sebagai wadah untuk menjaga dan memperjuangkan cita cita bersama.
2. Bentuk pendidikan politik
 - a. Formal
 - b. Informal
3. Partisipasi

- a. Ikut bertasipasi dalam kegiatan pemilihan umum
- b. Keterlibatan kedalam kegiatan kegiatan organisasi sosial maupun politik
- c. Partisipasi politik yang berupa tindakan denan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Dari keseluruhan uraian di atas, definisi konseptual dan operasional penulis sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Definisi Konsep dan Operasional

No	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Wawancara
1	Peran	(a) Motivator	W 1
		(b) Fasilitator	W 2
		(c) Pembina	W 3
		(d) Mobilisator	W 4
2	Pendidikan Politik	(a) Formal	W 5
		(b) Informal	W 6
3	Partisipasi	(a) <i>Electoral Activity</i>	W 7
		(c) <i>Organizational Activity</i>	W 8
		(e) <i>Violence</i>	W 9

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki kegunaan antara lain untuk memahami interaksi sosial dan memahami perilaku orang yang sulit untuk dimengerti(Husein, 2014:18). Denzin dan Lincoln mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada(Norman, 2015:7-8).

Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014:7)

Alasan menggunakan metode kualitatif karena pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud adalah peran gerakan pemuda ka'bah dalam pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat (Moleong, 2014:7)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam/*in-depth interviews* dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian.
- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, materi pendidikan politik, laporan, gambar, dokumen

elektronik, ensiklopedia, artikel, peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu peran Gerakan Pemuda Ka'bah dalam pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum muda Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Wawancara dan dokumentasi dilakukan secara terus menerus hingga mencapai titik jenuh (*saturation*).

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber informan yang dapat berupa hasil wawancara, observasi lapangan, dan data mengenai informan (Hasan, 2002:82).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau didapatkan dari sumber-sumber penelitian yang telah ada oleh peneliti yang digunakan untuk mendukung data primer yang dapat berupa literatur, buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya (Hasan, 2002:82).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan menggabungkan data ke dalam pola, tema, kategori, sedangkan penafsiran adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, dan mencari hubungan antara

beberapa konsep. Penafsiran menggambarkan perspektif peneliti bukan kebenaran. Analisis dan penafsiran data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya bukan merupakan hal yang berjalan bersama, keduanya dilakukan sejak awal penelitian (Nasution, 2010:96). Analisis data dilakukan agar data yang telah diperoleh akan lebih bermakna. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana berangkat dari kemampuan peneliti dalam menalar dan menghubungkan fakta fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di fenomena sosial yang ingin diteliti.

6. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan cara *triangulasi* sumber data untuk pemeriksaan keabsahan data, artinya peneliti mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda. Kebenaran data yang didapatkan dari salah satu informan akan dikonfirmasi dengan data yang diperoleh dari informan yang lain. Dengan demikian setiap informan akan berlaku sebagai informan kontrol satu dengan yang lainnya.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang terjun ke lapangan, serta berusaha untuk membandingkan kebenaran data yang didapat sehingga data

yang terkumpul dalam penelitian ini akan terjamin validitasnya.

Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data(Moleong, 2014:78).

Triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut(Moleong, 2014:88):

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif dari seseorang dengan berbagai pendapat orang lain.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dengan cara tersebut diharapkan akan diperoleh data-data yang terbukti keabsahannya, keabsahan data akan menjadi titik tolak hasil penelitian yang akurat dan terpercaya.